



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VIII DPR RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 12
Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat/ ke - 3
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Senin, 10 Juli 2017</b>
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: <b>Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.</b>
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Pendalaman Program dan Fungsi RKA K-L dan RKP K-L Tahun 2008
Hadir	: 1. .... orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. Irjen Kemensos RI beserta jajarannya 3. Dirjen Linjamsos Kemensos RI beserta jajarannya

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.15 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc sesuai tempat dan acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Inspektur Jenderal dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI membahas “**Pendalaman Program dan Fungsi RKA K-L dan RKP K-L Tahun 2018**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Inspektur Jenderal Kemensos RI mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp35.788.404.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah)**, yang akan dialokasikan untuk program sebagai berikut:
  - a. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial sebesar **Rp2.567.899.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**
  - b. Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin sebesar **Rp2.785.331.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)**.
  - c. Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial **Rp2.273.363.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)**.
  - d. Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Penunjang sebesar **Rp2.571.801.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah)**.
  - e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebesar **Rp25.590.010.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah)**.
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Pagu Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp17.848.520.153.000,- (Tujuh Belas Triliun Delapan Ratus Empat Puluh**

***Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah***), yang akan dialokasikan untuk program :

- a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar **Rp52.648.287.000,-** (***Lima Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah***).
  - b. Program Jaminan Sosial Keluarga sebesar **Rp17.317.200.000.000,-** (***Tujuh belas triliun tiga ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah***).
  - c. Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebesar **Rp366.655.966.000,-** (***Tiga Ratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah***).
  - d. Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebesar **Rp112.015.900.000,-** (***Seratus Dua Belas Miliar Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah***).
3. Komisi VIII DPR RI menerima usulan Anggaran Tambahan bagi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar **Rp568.460.203.000,-** (***Lima Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah***).
4. Dalam rangka melakukan penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018, Komisi VIII DPR RI mendesak Irjen dan Dirjen Linjamsos Kemensos RI untuk menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:
- a. Penguatan kegiatan yang berorientasi program pencegahan bencana sosial dan berbagai konflik yang berdampak timbulnya korban sosial.
  - b. Meningkatkan jumlah dan peran pendamping PKH untuk mengefektifkan realisasi serta manfaat program keluarga harapan.
  - c. Mendukung upaya peningkatan alokasi anggaran dari 0,2% menjadi 0,5% untuk fungsi dan program pengawasan dan pemeriksaan untuk memenuhi target dan jangkauan obyek pengawasan.
  - d. Meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan masing-masing satuan kerja mulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

- e. Memastikan program keluarga harapan, perlindungan sosial korban bencana sosial dan bencana alam penyalurannya tepat sasaran dan berbasis data.
- f. Untuk menjaga kelangsungan dan mutu pelayanan kepada korban bencana alam, maka anggaran program bantuan seperti pemenuhan kebutuhan pokok dan lain-lain perlu dipertahankan minimal sesuai anggaran tahun 2017.
- g. Mendorong Kementerian Sosial RI dalam rangka melakukan pengawasan oleh Komisi VIII DPR RI memberikan kemudahan akses data penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial di daerah melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) setempat yang dananya bersumber dari APBN.

### **III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 17.25 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.**